

LAPORAN CALK

AUDITED 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Ambon, 31 Desember 2025

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

Manjo, S.St.Pi, M.Pi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	x
Daftar Isi	x
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Ringkasan	x
I. Laporan Realisasi Anggaran	x
II. Neraca	x
III. Laporan Operasional	x
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	x
V. Catatan atas Laporan Keuangan	x
A. Penjelasan Umum	x
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	x
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	x
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	x
F. Pengungkapan Penting Lainnya	x
VI. Lampiran dan Daftar	x



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

LAKSDYA LEO WATTIMENA WAIHERU, BAGUALA, KOTA AMBON 97232 TELUK AMBON

TELEPON 0811471667. EMAIL : ambonbpbl@gmail.com

LAMAN www.kkp.go.id/djpb/bpblambon

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan AUDITED Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Ambon, 31 Desember 2025

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

Manijo, S.St.Pi, M.Pi

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 31 Desember Tahun 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp714.008.616,- atau mencapai 71,59 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp997.400.000,-

Realisasi Belanja Negara pada Semester II TA 2024 adalah sebesar Rp20.014.861.144,- mencapai 97,64 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp20.499.256.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp72.160.770.120,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.645.565.973,- Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0,- Aset Tetap (neto) sebesar Rp69.726.526.945,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp788.677.202,-

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp893.841.363,- dan Rp71.266.928.757,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp695.708.616,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp23.364.801.185,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(22.669.092.569,-) Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa

masing-masing sebesar Rp(120.592.450,-) dan sebesar Rp(22.789.685.019,-),- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(22.789.685.019,-)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp74.607.496.701,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(22.789.685.019,-) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp(148.264.547),- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp19.300.852.528,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp71.266.928.757,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 202 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	997.400.000	714.008.616	(283.391.384)	71,59	968.400.000	1.047.956.775	79.556.775	108.22
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	997.400.000	714.008.616	(283.391.384)	71,59	968.400.000	1.047.956.775	79.556.775	108.22
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	997.400.000	714.008.616	(283.391.384)	71,59	968.400.000	1.047.956.775	79.556.775	108.22
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	20.499.256.000	20.014.861.144	(484.394.856)	97,64	32.927.549.000	32.737.688.664	(189.860.336)	99,42
1. Belanja Pegawai	9.385.610.000	9.378.591.169	(7.018.831)	99,93	8.920.110.000	8.910.812.158	(9.297.842)	99,9
2. Belanja Barang	10.913.646.000	10.636.269.975	(277.376.025)	97,46	22.898.939.000	22.720.722.249	(178.216.751)	99,22
3. Belanja Modal	200.000.000	0	(200.000.000)	0,00	1.108.500.000	1.106.154.257	(2.345.743)	99,79
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	20.499.256.000	20.014.861.144	(484.394.856)	97,64	32.927.549.000	32.737.688.664	(189.860.336)	99,42
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

II. NERACA

KANTOR BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	1.645.565.973	2.687.741.906	(1.042.175.933)	(38,78)
JUMLAH ASET LANCAR	1.645.565.973	2.687.741.906	(1.042.175.933)	(38,78)
ASET TETAP				
Tanah	25.370.380.000	25.370.380.000	0	0,00
Peralatan dan Mesin	40.592.178.319	40.833.272.924	(241.094.605)	(0,59)
Gedung dan Bangunan	44.804.926.385	44.802.822.103	2.104.282	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.171.281.051	9.171.281.051	0	0,00
Aset Tetap Lainnya	39.950.200	39.950.200	0	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	46.781.482	(46.781.482)	(100,00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(50.252.189.010)	(48.210.213.663)	(2.041.975.347)	4,24
JUMLAH ASET TETAP	69.726.526.945	72.054.274.097	(2.327.747.152)	(3,23)
ASET LAINNYA				
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	744.000.002	0	744.000.002	0,00
Aset Lain-lain	285.771.805	0	285.771.805	0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(241.094.605)	0	(241.094.605)	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	788.677.202	0	788.677.202	
JUMLAH ASET	72.160.770.120	74.742.016.003	(2.581.245.883)	(3,45)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	893.841.363	134.519.302	759.322.061	564,47
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	893.841.363	134.519.302	759.322.061	564,47
JUMLAH KEWAJIBAN	893.841.363	134.519.302	759.322.061	564,47
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	71.266.928.757	74.607.496.701	(3.340.567.944)	(4,48)
JUMLAH EKUITAS	71.266.928.757	74.607.496.701	(3.340.567.944)	(4,48)
JUMLAH EKUITAS	71.266.928.757	74.607.496.701	(3.340.567.944)	(4,48)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	72.160.770.120	74.742.016.003	(2.581.245.883)	(3,45)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN / PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	695.708.616	1.016.394.541	(320.685.925)	(31,551)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	695.708.616	1.016.394.541	(320.685.925)	(31,551)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	695.708.616	1.016.394.541	(320.685.925)	(31,551)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	9.433.179.169	8.910.812.158	522.367.011	5,862
Beban Persediaan	1.947.046.583	2.998.476.151	(1.051.429.568)	(35,065)

Beban Barang dan Jasa	3.227.111.673	5.807.265.225	(2.580.153.552)	(44,43)
Beban Pemeliharaan	1.050.091.535	1.443.703.032	(393.611.497)	(27,264)
Beban Perjalanan Dinas	695.171.920	2.626.959.000	(1.931.787.080)	(73,537)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	4.729.155.706	10.942.892.595	(6.213.736.889)	(56,783)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.283.044.599	2.501.431.641	(218.387.042)	(8,73)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	23.364.801.185	35.231.539.802	(11.866.738.617)	(33,682)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(22.669.092.569)	(34.215.145.261)	11.546.052.692	(33,745)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(1.802.322.050)	(2.129.651.698)	327.329.648	(15,37)
Pendapatan Pelepasan Aset	18.300.000	19.274.000	(974.000)	(5,053)
Beban Pelepasan Aset	1.820.622.050	2.148.925.698	(328.303.648)	(15,278)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.681.729.600	3.365.894.934	(1.684.165.334)	(50,036)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.682.529.600	3.372.394.934	(1.689.865.334)	(50,109)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	800.000	6.500.000	(5.700.000)	(87,692)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(120.592.450)	1.236.243.236	(1.356.835.686)	109,75
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(22.789.685.019)	(32.978.902.025)	10.189.217.006	(30,896)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(22.789.685.019)	(32.978.902.025)	10.189.217.006	(30,896)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN / PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	74.607.496.701	75.897.108.659	(1.289.611.958)	(1,7)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(22.789.685.019)	(32.978.902.025)	10.189.217.006	(30,9)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	148.264.547	(441.822)	148.706.369	(33,657.53)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	148.289.900	(496.000)	148.785.900	(29,997.16)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(25.353)	0	(25.353)	0
LAIN-LAIN	0	54.178	(54.178)	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	19.300.852.528	31.689.731.889	(12.388.879.361)	(39,09)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(3.340.567.944)	(1.289.611.958)	(2.050.955.986)	159,04
EKUITAS AKHIR	71.266.928.757	74.607.496.701	(3.340.567.944)	(4,48)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Kantor Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Laksdya Leo Wattimena Waiheru Ambon.

Kantor Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon berkomitmen dengan visi “**Mewujudkan Balai Sebagai Pusat Pelayanan Perikanan Budidaya Yang Prima.**” Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.

- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

A.5. Kebijakan Akuntansi

Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh

Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon adalah sebagai berikut:

Pendapatan- **(1) Pendapatan- LRA**

LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- **(2) Pendapatan- LO**

LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset

a. Aset Lancar

Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan

tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di

bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan

dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Kantor Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara

Uraian	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan penerimaan	997.400.000	-
		-
Jumlah Pendapatan	997.400.000	-
Belanja		
Belanja Pegawai	9.385.610.000	9.385.610.000
Belanja Barang	15.179.660.000	10.913.646.000
Belanja Modal	265.000.000	200.000.000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	24.830.270.000	20.499.256.000

Realisasi

Pendapatan

Rp714.008.616,-.

,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp714.008.616,- atau mencapai 71,59 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp997.400.000,- Pendapatan Kantor Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember
TA 2025*

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan	997.400.000		-
Pendapatan Penjualan Hsl Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	-	521.112.500	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		18.300.000	
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan			
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana		155.810.116	
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi		18.786.000	
Pendapatan denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL			
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL			
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL			
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji			
Jumlah	997.400.000	714.008.616	71,59

Realisasi Pendapatan TA 2025 mengalami Penurunan 36 persen dibandingkan TA 2024. Disebabkan efisiensi Anggaran yg berdampak kepada Pendapatan Komoditas.

Realisasi Belanja

B.2 Belanja

Negara

Rp20.014.861.144.

, -

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember TA 2025 adalah sebesar Rp. 20.014.861.144,- atau 97.64% dari anggaran belanja sebesar Rp. 32.737.688.664,- Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember TA 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember
TA 2025*

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	9.385.610.000	9.378.591.224	99,93
Belanja Barang	10.913.646.000	10.636.269.975	97,46
Belanja Modal	200.000.000	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	20.499.256.000	20.014.861.199	97,64
Pengembalian		55	-
Jumlah	20.499.256.000	20.014.861.144	97,64

Pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024 tidak mengalami Kenaikan maupun penurunan, Hal ini disebabkan Adanya Efisiensi Anggaran pada Tahun 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	9.378.591.224	8.915.506.959	5,19
Belanja Barang	10.636.269.975	22.720.722.249	(53,19)
Belanja Modal	-	1.106.154.257	(100,00)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	20.014.861.199	32.742.383.465	
Pengembalian	55		
Jumlah	20.014.861.144	32.742.383.465	(38,87)

*Belanja Pegawai
Rp9.378.591.224,-*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.378.591.224,- dan Rp8.915.506.959,- Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan

pembentukan modal. Realisasi belanja per 31 Desember TA 2025 mengalami Kenaikan sebesar 5,19 persen dari TA 2024.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.714.752.740	2.890.795.100	(6,09)
Belanja Gaji (Tunjangan Khusus/Keg)	4.231.218.628	4.162.296.765	1,66
Belanja Pembulatan	34.960	46.099	(24,16)
Belanja Tunj. Suami/Istri	219.427.730	235.810.960	(6,95)
Belanja Tunj. Anak PNS	68.102.936	69.793.282	(2,42)
Belanja Tunj. Struktural PNS	25.200.000	29.520.000	(14,63)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	100.680.000	250.760.000	(59,85)
Belanja Tunj. PPH PNS	20.149.438	25.108.731	(19,75)
Belanja Tunj. Beras PNS	155.558.160	165.769.380	(6,16)
Belanja Tunj. Uang Makan PNS	374.993.000	401.132.000	(6,52)
Belanja Tunj. Umum PNS	18.000.000	21.080.000	(14,61)
Belanja Uang Lembur	170.222.300	68.445.000	148,70
Belanja Gaji Pokok PPPK	455.653.208	233.128.200	95,45
Belanja Pembulatan PPPK	10.604	4.657	127,70
Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	24.652.950	10.010.340	146,27
Belanja Tunj. Anak PNS PPPK	7.951.952	3.107.128	155,93
Belanja Tunj. Beras PNS PPPK	29.595.640	12.890.760	129,59
Belanja Tunj. Uang Makan PPPK	86.927.000	46.359.000	87,51
Belanja Tunj. Umum PPPK	8.640.000		
Belanja Uang Lembur PPPK	71.771.600		
Belanja Gaji (Tunjangan Khusus/Keg) PPPK	595.048.378	289.449.557	105,58
Jumlah Belanja Kotor	9.378.591.224	8.915.506.959	5,19
Pengembalian Belanja Pegawai	55	4.694.801	(100,00)
Jumlah Belanja	9.378.591.169	8.910.812.158	5,25

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang

Rp10.636.269.975,-

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp10.636.269.975,- dan Rp22.720.722.249,- Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami Penurunan 53,19% dari Realisasi Belanja Barang TA 2024.

Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.257.726.515	1.619.900.769	(22,36)
Belanja Barang Non Operasional	218.099.644	1.401.287.509	(84,44)
Belanja Barang Persediaan	1.538.546.400	3.191.201.195	
Belanja Jasa	1.790.551.455	2.831.033.839	(36,75)
Belanja Pemeliharaan	1.047.099.035	1.304.483.342	(19,73)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	695.171.920	2.626.959.000	(73,54)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	4.089.075.006	8.568.430.000	(52,28)
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masy.	-	1.177.426.595	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	10.636.269.975	22.720.722.249	(53,19)
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	10.636.269.975	22.720.722.249	(53,19)

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp0,-

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp Rp1.106.154.257,- Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami Penurunan sebesar (100%) dibandingkan TA 2024 disebabkan tidak ada penambahan belanja modal Gedung dan bangunan

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A 2025	REALISASI TA. 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		769.372.232	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		336.782.025	(100,00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			#DIV/0!
Belanja Modal Lainnya			
Jumlah Belanja Kotor	0	1.106.154.257	-100,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	1.106.154.257	-100,00

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024 Rp. 0,-

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2024	REALISASI T.A 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0		
Jumlah Belanja Kotor	0	0	
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 adalah sebesar Rp0,- dan Realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp769.372.232,- Terjadi Penurunan pada peralatan dan mesin dikarenakan tidak adanya Penambahan pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Desember TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Mesin	0	769.372.232	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	769.372.232	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	769.372.232	#DIV/0!

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp336.782.025,- terjadi Penurunan di Tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan per 31 Desember TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Gedung dan Bangunan	0	336.782.025	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	336.782.025	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	336.782.025	#DIV/0!

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp00,- dan Rp336.782.025,-

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp00,- dan Rp00,-

Belanja Bantuan Sosial Rp.0,-

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Pada Tahun Anggaran 2025 Balai Perikanan Budidaya laut Ambon Tidak Memiliki Belanja Bantuan Sosial.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp.0,-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2025 dan 2024

Keterangan	TH 2025	TH 2024
Uang Tunai	-	-
Bank BTN Cab.Ambon	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp.0,-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar masing-masing Rp.0,- dan Rp.0,- Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2025 dan 2024

Keterangan	TH 2025	TH 2024
Uang Tunai	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp. 0,-*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,-

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Piutang PNB
Rp.0,-*

C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-
Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp.0*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Bagian Lancar
TPA
Rp.0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0 Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Lancar
Rp.0,-

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.0 dan Rp-54.178,- Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Belanja Dibayar
di Muka Rp. 0,-

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp.0 Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari

barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2025 dan 2024

Jenis	TH 2025	TH 2024
Pembayaran Internet		
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin		
Pembayaran Sewa Gedung Kantor		
Jumlah	-	-

*Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima Rp.0,-*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0,- merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
TA 2025 dan 2024*

Jenis	TH 2024	TH 2023
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan

Rp1.645.565.973,

-

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.645.565.973,- dan Rp2.687.741.906,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2025 dan 2024

Jenis	TH 2025	TH 2024
Barang Konsumsi	594.196.005	680.256.209
Barang untuk Pemeliharaan	-	360.000
Suku Cadang	2.519.000	5.151.500
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	576.329.000	1.154.271.000
Persediaan Lainnya	270.411.050	548.370.500
Bahan Baku	202.110.918	299.332.697
Jumlah	1.645.565.973	2.687.741.906

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan TP/TGR

Rp.0,-

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah

tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp.0,-

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
Rp.0

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

C.14 Tanah

Tanah
Rp25.370.380.00
0,-

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 25.370.380.000 dan Rp. 25.370.380.000,-.

C.15 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
Rp40.592.178.31
9,-

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp40.592.178.319,- dan Rp40.833.272.924,- Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	40.833.272.924
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Perolehan Lainnya	
Relkas Masuk	
Transfer Masuk	
Koreksi tambah	
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatan nilai berkurang	
Penghentian dari penggunaan	241.094.605
Saldo per 31 Desember 2025	40.592.178.319
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-38.478.785.848
Nilai Buku per 31 Desember 2025	2.113.392.471

C.16 Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan

Rp44.804.926.385,-

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp44.804.926.385,- dan Rp44.802.822.103,- Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	44.802.822.103
Mutasi tambah:	
Pengembangan melalui KDP	
penyelesaian pembangunan dengan KDP	
Mutasi kurang:	
koreksi pencatatan nilai berkurang	
koreksi pencatatan nilai bertambah	2.104.282
Saldo per 31 Desember 2025	44.804.926.385
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(8.594.949.324)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	36.209.977.061

Pada per 31 Desember 2025 Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon terdapat penambahan pada Modal Gedung dan Bangunan

Jalan,Jaringan
dan Irigasi Rp.
9.171.281.051,-

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.171.281.051,- dan Rp9.171.281.051,- Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	9.171.281.051
Mutasi tambah: Penambahan jaringan teknologi informasi	
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2025	9.171.281.051
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(3.158.503.638)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	6.012.777.413

Aset Tetap
Lainnya
Rp39.950.200,-

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp39.950.200,- dan Rp39.950.200,- Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2025, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	39.950.200
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2025	39.950.200
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	-19.950.200
Nilai Buku per 31 Desember 2025	20.000.000

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0,-

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

- Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing sebesar Senilai Rp0,- dan Rp46.781.482,-.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(50.252.189.010,-)

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp(50.252.189.010,-) dan Rp(48.210.213.663,-) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
TA 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	25.370.380.000	0	25.370.380.000
2	Peralatan dan Mesin	40.592.178.319	38.478.785.848	2.113.392.471
3	Gedung dan Bangunan	44.804.926.385	8.594.949.324	36.209.977.061
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.171.281.051	3.158.503.638	6.012.777.413
5	Aset tetap yg tidak di gunakan		0	0
6	Aset Tetap Lainnya	39.950.200	19.950.200	20.000.000
Akumulasi Penyusutan		94.608.335.955	50.252.189.010	44.356.146.945

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak
Berwujud Rp. 0,-

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 0,- dan Rp.0,-

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Lain-Lain
Rp0,-

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0,- dan Rp0,- Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	285.771.805
Mutasi kurang:	
- Penghentian Aset dari Penggunaan	
- penghapusan BMN	
Saldo per 31 Desember 2025	285.771.805
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	285.771.805

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(241.094.605,-)

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp(241.094.605,-) dan Rp0,- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tetap yg tidak digunakan	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari
KPPN Rp. 0,-

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,- Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp893.841.363,-*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp893.841.363,- dan Rp134.519.302,- Utang kepada Pihak Ketiga tersebut merupakan Tagihan Listrik Bulan Desember Tahun 2024 dan Tagihan Uang Makan Bulan Desember 2024.

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp.0,-*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar
Rp893.841.363,-*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp893.841.363,- dan Rp134.519.302,-. beban tersebut merupakan Tagihan Listrik bulan Desember 2024.

*Ekuitas
Rp71.266.928.75
7,-*

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp71.266.928.757,- dan Rp74.607.496.701,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp695.708.616,-

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.016.394.541,- dan Rp988.433.108,-
Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan	695.708.616	1.016.394.541	- 31,55
Jumlah	695.708.616	1.016.394.541	(31,55)

Penjelasan perbedaan Antara pendapatan di LRA dan Pendapatan di LO

URAIAN	Akun	Jumlah	Keterangan
Pendapatan LRA		714.008.616	
Pendapatan piutang PNB Lainnya		695.708.616	
Selisih Pendapatan LRA dan LO		18.300.000	
	425151	155.810.116	
	425289	18.786.000	
Penjelasan	425122	18.300.000	Realisasi yg tdk masuk ke LO
		18.300.000	

Beban Pegawai
Rp9.433.179.169,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.433.179.169,- dan Rp8.910.812.158,- Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Persediaan
Rp1.947.046.583,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.947.046.583,00 dan Rp2.998.476.151,00 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

*Beban Barang dan
Jasa*
Rp3.227.111.673,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.227.111.673,- dan Rp5.807.265.225,- Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan

*Beban Pemeliharaan
Rp1.050.091.535,-*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.050.091.535,- dan Rp1.443.703.032,- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya peningkatan beban Gedung dan bangunan dan beban persediaan suku cadang Penambahan Aset peralatan dan mesin.

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp695.171.920,-*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp695.171.920,- dan Rp2.626.959.000,- Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

*Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp4.729.155.706,-*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.729.155.706,- dan Rp10.942.892.595,- Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat. Terdapat perbedaan Realisasi antara LRA dengan LO dikarenakan Terdapat Jurnal Beban Persediaan yang Tidak Tercatat sebagai Beban Persediaan pada LO serta adanya pengembalian belanja.

*Beban Bantuan
Sosial Rp.0,-*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Pada Tahun Anggaran 2025 Balai Budidaya Laut Ambon tidak memiliki Beban Bantuan Sosial.

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp2.283.044.599,-*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024

adalah masing-masing sebesar Rp2.283.044.599,- dan Rp2.501.431.641,- Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2025 dan 2025*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	902.906.180	1.081.386.712	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.042.294.022	1.038.682.790	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	337.844.397	381.362.139	-
Beban Amortisasi Software			
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			-
Jumlah Penyusutan	2.283.044.599	2.501.431.641	-

*Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp.0,-*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pada Tahun Anggaran 2025 Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tidak memiliki Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

*Surplus dari Kegiatan
Non Operasional
Rp(120.592.450,-)*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk Tahun 2025 dan 2024 Rp(120.592.450,-) dan Rp1.236.243.236,- terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Pos Luar Biasa Rp.
0,-

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp74.607.496.701,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp74.607.496.701,- dan Rp75.897.108.659,-

Defisit LO

Rp(22.789.685.019,-)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp (32.978.902.025,-) dan Rp(32.978.902.025,-) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai

Aset

Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp. 0,- Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp148.289.900,-

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp148.289.900,- dan Rp(496.000,-)

Selisih Revaluasi

Aset Tetap Rp0,-

-

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-

masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp(25.353,-)*

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp(25.353,-) dan Rp0,- Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Koreksi Lain-Lain
Rp0,-*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,- dan Rp54.178,- Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp19.300.852.528,-*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp19.300.852.528,- dan Rp31.689.731.889,- Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp0,- sedangkan DKEL sebesar Rp0,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,- Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00,-

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.0-. dari total Rp.0,- yang diterima sepanjang tahun 2025.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp.0.

Ekuitas Akhir

Rp71.266.928.757,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp71.266.928.757,- dan Rp74.607.496.701,-

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

- Sampai dengan Tanggal Neraca 31 Desember 2025 masih terdapat Utang kepada pihak ketiga Senilai Rp. 893.841.363,- yang belum di bayarkan berupa:
 - ✓ Beban Listrik Bulan Desember Tahun 2025 sebesar Rp95.253.361,-.
 - ✓ Pembayaran Uang Makan Bulan Desember 2025 Sebesar Rp54.588.000,- , terdiri dari uang makan PNS dan PPPK Bulan Desember 2025 yang di bebaskan pada Dipa Tahun 2026.
- Dan Pembayaran RPATA yang BAST tertanggal 31 Desember 2025 dan SP2D terbit di Tahun 2026 Senilai Rp744.000.002,-

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Pada Tahun 2026 terdapat Pengembalian Sisa Dana UP Bendahara Pengeluaran sebesar Rp38.287.462,- Pada Tanggal 30 Desember Tahun 2026. Bukti setoran terlampir.
- **Pengungkapan Capaian Rincian Output Perfungsi APBN**

Capaian Rincian Output menurut Klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 Pada Balai perikanan Budidaya Laut Ambon terdapat pada Fungsi Ekonomi (04) dan sub fungsi Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan (04.03) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian RO	Satuan	Target Volume	Realisasi Volume	Pagu	Realisasi*	%
1	Bibit Rumput Laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat	Unit	3135	3135	219.426.000	219.426.000	100
2	Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat	Unit	1	1	118.800.000	118.799.920	100
3	Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya	orang	3	3	2.073.000	2.073.000	100
4	Sampel Residu Ikan Air Laut Layanan UPT	Sampel	238	238	49.742.000	49.742.000	100
5	Sampel Mikrobiologi Ikan Air Laut Layanan UPT	Sampel	49	49	27.048.000	11.038.000	40,81
6	Sampel Biologi Molekuler Ikan Air Laut Layanan UPT	Sampel	9	9	8.624.000	8.620.000	99,95
7	Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat	Ekor	288923	288923	1.733.534.000	1.273.439.804	73,46
8	Sampel Surveillance Resistensi Antimikroba Ikan Air Laut (AMU/AMR) yang diuji	Sampel	17	17	15.538.000	15.537.500	100
9	Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi	Unit	1134	1134	305.968.000	305.968.000	100
10	Sarana Budi Daya Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	Unit	22	22	4.359.220.000	4.358.295.006	99,98
11	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1	1	21.313.000	21.312.980	100
12	Layanan Umum	Layanan	1	1	22.735.000	22.735.000	100
13	Layanan Perkantoran	Layanan	2	2	13.324.469.000	13.317.108.229	99,94
14	Layanan Manajemen SDM	Orang	4	4	4.626.000	4.626.000	100

15	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	1	1	127.350.000	127.350.000	100
16	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	1	1	43.590.000	43.589.760	100
17	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	1	1	112.200.000	112.200.000	100
18	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	1	1	3.000.000	3.000.000	100

PRIORITAS NASIONAL

Prioritas Nasipnal	Program Prioritas	Satuan	Target Volume	Realisasi Volume	Pagu	Realisasi*	%
Swasembada Pangan	Bibit Rumput Laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat	Unit	3135	3135	219.426.000	219.426.000	100
	Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat	Ekor	288923	288923	1.733.534.000	1.273.439.804	73,46
	Sampel Surveillance Resistensi Antimikroba Ikan Air Laut (AMU/AMR) yang diuji	Sampel	17	17	15.538.000	15.537.500	100
	Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi	Unit	1134	1134	305.968.000	305.968.000	100
	Sarana Budi Daya Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	Unit	22	22	4.359.220.000	4.358.295.006	99,98

